

ABSTRAK

Pupuk anorganik termasuk komoditas yang dilindungi, untuk memproduksinya ada syarat-syarat tertentu atau standar yang harus dipenuhi sehingga Negara menetapkan bahwa pupuk anorganik adalah salah satu komoditi yang wajib mempunyai SNI (Standar Nasional Indonesia) tujuannya adalah agar pupuk anorganik ini benar-benar dapat menunjang produksi hasil pertanian menjadi bagus, hal ini diatur dalam UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian, UU Perindustrian, UU Perdagangan serta peraturan perundangan lainnya. Seperti halnya dalam kasus ini pelaku memproduksi dan memperjualbelikan pupuk NPK merek MH 88 dan merek Berlian Ijo tanpa menggunakan Standar Nasional Indonesia, dimana hal ini akan sangat merugikan para petani yang menggunakan pupuk tersebut karena pupuk tersebut dibuat tidak dengan takaran yang semestinya. Pada kasus ini penyidik menerapkan Pasal 113 UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 62 Jo Pasal 8 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 120 UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Dan UU Darurat No 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Perpres No.15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Dan Permenrin No. : 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik, tetapi penulis akan menganalisis apakah penerapan hukum oleh penyidik Polda Jabar terhadap pelaku tindak pidana persaingan usaha yang tidak mencantumkan label SNI pada produknya sudah tepat? dan tindakan hukum lain apakah yang dapat diterapkan pada pelaku tindak pidana produk tanpa SNI?

Metode penelitian yang digunakan dalam legal memorandum ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif karena dalam penelitiannya hanya mengumpulkan data primer bahan hukum sekunder yaitu dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam suatu kasus yang sedang dalam penyidikan.

Penerapan Pasal 113 UU No.7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, Pasal 62 Jo Pasal 8 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 120 UU No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Dan UU Darurat No 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, Perpres No.15 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan. Dan Permenrin No. : 08/M-IND/PER/2/2014 Tentang Pemberlakuan SNI Pupuk Anorganik oleh penyidik Polda Jabar terhadap kasus ini kurang tepat seharusnya penyidik menerapkan juga pasal-pasal pidana dalam UU No 20 tahun 2014 tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian. Sedangkan tindakan hukum lain yaitu selain dari dilakukannya penangkapan, penyegelan, penyidik juga harus melakukan penarikan terhadap produk pupuk anorganik tersebut serta memberikan kewajiban pada pelaku untuk mengganti rugi pada korban yang menderita kerugian akibat menggunakan pupuk anorganik yang tidak ber SNI tersebut.

Abstrac

Inorganic fertilizer is a protected commodity, to produce it there are certain conditions or standards that must be met so that the State stipulates that inorganic fertilizer is one of the commodities that must have SNI (Indonesian National Standard). The goal is that this inorganic fertilizer can really support production good agricultural output, this is regulated in Law No. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment, Industrial Law, Trade Law and other laws and regulations. As is the case in this case the perpetrators produced and traded NPK fertilizer MH 88 and Berlian Ijo brands without using the Indonesian National Standard, where this would be very detrimental to the farmers who used the fertilizer because the fertilizer was not made at the proper dosage. In this case the investigator applied Article 113 of Law No.7 of 2014 concerning Trade, Article 62 Jo of Article 8 of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 120 of Law No.3 of 2014 concerning Industry and Emergency Law No. 7 of 1955 concerning Investigation , Prosecution and Justice of Economic Crimes, Perpres No.15 of 2011 concerning the Determination of Subsidized Fertilizers as Goods in Supervision. Dan Permenrin No. : 08 / M-IND / PER / 2/2014 Regarding the Application of SNI for Inorganic Fertilizers, but the author will analyze whether the application of law by West Java Regional Police investigators against business competition criminal offenses that do not include SNI labels on their products is appropriate? And what other legal actions are which can be applied to product offenders without SNI?

The research method used in this legal memorandum is to use the normative juridical research method because in his research he only collects primary data on secondary legal material, namely from the applicable laws and regulations and how they are applied in a case under investigation.

Application of Article 113 of Law No.7 of 2014 concerning Trade, Article 62 Jo of Article 8 of Law No.8 of 1999 concerning Consumer Protection, Article 120 of Law No.3 of 2014 concerning Industry and Emergency Law No. 7 of 1955 concerning Investigation, Prosecution and Judiciary Economic Crimes, Presidential Regulation No.15 of 2011 Regarding the Stipulation of Subsidized Fertilizers as Goods Under Supervision. Dan Permenrin No. : 08 / M-IND / PER / 2/2014 Regarding the Application of SNI for Inorganic Fertilizers by West Java Regional Police investigators in this case, the investigator should also apply criminal articles in Law No. 20 of 2014 concerning Standardization and Conformity Assessment. Meanwhile, other legal actions, aside from arresting, sealing, investigators must also make withdrawals of the inorganic fertilizer products as well as giving obligations to the offender to compensate victims who suffer losses due to using non-SNI inorganic fertilizers.